



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

PROFIL PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

- 1 Kode Perangkat Daerah** : 2.9.3.27.0.0.02
- 2 Nomenklatur Perangkat Daerah** : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- 3 Urusan** : Pangan, Pertanian dan Perikanan
- 4 Sejarah Dinas**

- Dinas Pertanian dan Perikanan dibentuk dengan Peraturan Walikota nomor 1 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk dengan Peraturan Daerah nomor 06 tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Terbentuk sejak tahun 2016, dibentuk melalui Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan perubahan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah No.62 Tahun 2016.
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan perubahan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah NO.39 Tahun 2022

5 Tempat dan Kedudukan

- 5.1 Alamat : : Jl. Tandon Ciater (Kawasan Pertanian Terpadu) Kel.Ciater, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.
- 5.2 Nomor Telepon : -
- 5.3 Faximil : -
- 5.4 E-mail : umpeg.dkp3tangsel@gmail.com dan Perencanaan.dkp3tangsel@gmail.com
- 5.6 Website : -
- 5.7 Medial Sosial : Instagram (dkp3.tangsel dan puskeswan kota tangsel)

6 Visi dan Misi

Visi

"TERWUJUDNYA TANGSEL UNGGUL, MENUJU KOTA LESTARI, SALING TERKONEKSI , EFEKTIF DAN EFISIEN"



Misi

Dinas mengampu satu/dua/tiga misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai misi organisasi. Misi tersebut digunakan sebagai langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi tersebut yaitu:

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul”.**
2. **Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional.**
3. **Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan.**
4. **Mengembangkan Ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan.**
5. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.**

7 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016.

Adapun kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja diatur pada Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

7.1 Tugas Dinas

Memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

7.2 Fungsi Dinas

- a. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pertanian dan Peternakan serta Perikanan;
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pertanian dan Peternakan serta Perikanan;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pertanian dan Peternakan serta Perikanan;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Dinas;



- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pertanian dan Peternakan serta Perikanan dengan lembaga/instansi terkait;
- f. Pelaksanaan penanganan kerawanan pangan dan pengelolaan cadangan pangan Kota;
- g. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- h. Penetapan tindak lanjut hasil pengawasan keamanan pangan segar;
- i. Penetapan hasil penghitungan Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi;
- j. Pelaksanaan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, produk pertanian, peternakan dan perikanan;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pengembangan penggunaan sarana/ prasarana/ sumber daya pertanian dan peternakan;
- l. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi Izin Usaha Pertanian;
- m. Pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- n. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, klinik hewan, pasar hewan, Rumah Potong Hewan, serta Produk Hewan; pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer meliputi toko, retail, sub distributor obat hewan;
- o. Pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan;
- p. Pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan;
- q. Pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- r. Pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
- s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

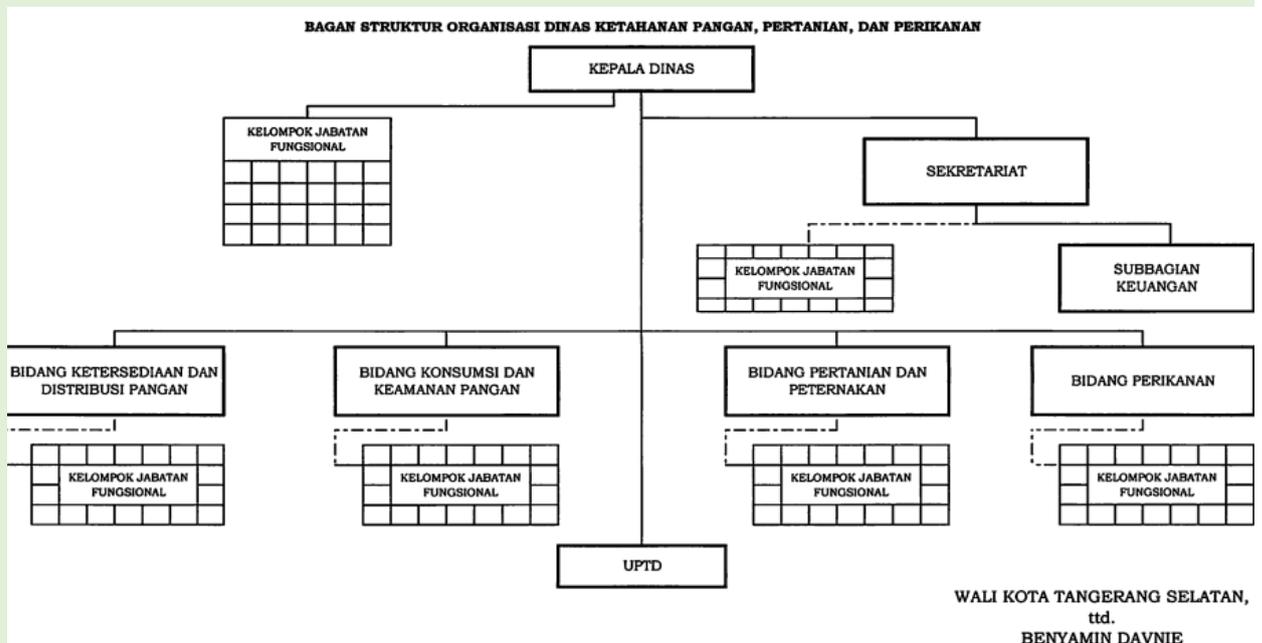
8 Struktur Organisasi Dinas

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas Jabatan Fungsional Analis Perencanaan Ahli Muda, Subbagian Keuangan dan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda.
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda.
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda.
5. Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan, terdiri atas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda, Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda.



6. Kepala Bidang Perikanan, terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan (UPTD. PUSKESWAN) terdiri atas Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kepala Tata Usaha Pusat Kesehatan Hewan.

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan pangan Pertanian dan Perikanan



9 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri dari dukungan pegawai berstatus pegawai negeri sipil dan non pegawai ASN dengan kuantitas dan kualitas sebagaimana diuraikan pada table berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Menurut Status Dan Jenis Kelamin





Status	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3
PNS	18	27
PPPK	-	2
Non PNS	53	18
Jumlah (%)	59,4	40,6

Tabel Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan

Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1	2	3
Pembina Utama Muda	IV/c	0
Pembina Tk I	IV/b	3
Pembina	IV/a	9
Penata Tk I	III/d	16
Penata	III/c	3
Penata Muda Tk 1	III/b	4
Penata Muda	III/a	8
Pengatur Tk 1	II/d	1
Pengatur	II/c	2

Gambar : Persentase SDM



10 Program

Program yang dilaksanakan perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi sebagai berikutL

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
7. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
8. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
10. Program Penyuluhan Pertanian

11 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang dihasilkan per tahun/ jumlah dokumen yang direncanakan per tahun x100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan - SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD



		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang dihasilkan per tahun/ jumlah dokumen yang direncanakan per tahun x100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan per Tahun
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan per Tahun
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan per Tahun
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan per Tahun
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan per Tahun
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan per Tahun
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan per Tahun
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah unit yang terealisasikan per tahun/jumlah unit yang direncanakan per tahun x100%



		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi dalam 1 Tahun
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah per tahun
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pemeliharaan barang (aset dinas) penunjang urusan pemerintahan daerah per tahun
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam 1 Tahun
6	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sarana pendukung yang siap digunakan
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah sarana pendukung operasional cadangan pangan



7	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah lokasi penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen informasi pangan dan bahan makanan
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah dokumen informasi pangan berbasis sumber daya lokal
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen informasi stok dan harga pangan
8	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan cadangan pangan kota yang siap didistribusikan
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah
9	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen kajian target konsumsi pangan per Kapita per Tahun
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lokasi penyuluhan keragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
10	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Jumlah dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan



		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen laporan kajian pemetaan ketahanan dan kerawanan pangan
11	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Daerah rawan pangan yang ditangani
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi penanganan daerah rawan pangan
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penyaluran cadangan pangan
12	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi pengawasan keamanan pangan segar daerah
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi fasilitasi rekomendasi keamanan pangan segar pertanian
13	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah peserta pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah peserta fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil





		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pendampingan dan pelatihan pembudidaya ikan kecil
14	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya ikan Kecil (TDIK) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan TDPIK
15	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi pembudidayaan ikan
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan prasarana pembudidayaan ikan
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha budidaya ikan yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
16	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro kecil yang memperoleh pendampingan



17	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah unit pengolah ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha binaan yang memperoleh pendampingan
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pengolah dan pemasar perikanan mikro kecil yang mendapatkan fasilitasi
18	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah Pengawasan sarana pertanian yang dilakukan
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana pertanian yang diberikan
19	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Kualitas SDG Hewan yang dihasilkan
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah hewan yang mendapatkan Inseminasi
20	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah hewan yang ditargetkan mendapat penanganan pencegahan penularan penyakit zoonosis
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang disteril
21	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pedagang hewan kurban yang terawasi



		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Cakupan pemantauan hewan kurban di lapak penjual hewan kurban
22	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
23	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase pasien penyakit hewan menular yang sembuh
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pasien yang terlayani
24	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase kelompok tani yang mendapatkan pembinaan tahunan
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan penyuluhan
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarpras pertanian yang disediakan dan dimanfaatkan

12 Jenis Layanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pelayanan yang diselenggarakan di setiap di unit kerja diinformasikan sebagai berikut:

Tabel Jenis Layanan Perangkat Daerah

Unit Kerja	Jenis Layanan
1	2
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. penyusunan, perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Dinas2. pengoordinasian pelaksanaan penelitian/ asistensi/ pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal/ kementerian/ lembaga/ instansi terkait



	<ol style="list-style-type: none">3. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggung jawaban pemerintah lingkup sekretariat dan Dinas;4. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;5. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan Dinas6. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Dinas7. pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Dinas8. hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di lingkup Dinas9. pengelolaan barang milik Daerah, arsip dan hubungan masyarakat10. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik;
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah2. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan;3. penanganan kerawanan pangan Kota4. pengadaan, pemeliharaan serta penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan5. penyediaan serta penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan6. pengelolaan cadangan pangan Kota;7. analisis dan kajian ketersediaan pangan, infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya serta sistem kewaspadaan pangan dan gizi8. penyusunan Neraca Bahan Makanan, kerentanan dan ketahanan pangan9. penghitungan Pola Pangan Harapan ketersediaan pangan10. pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan11. pengoordinasian ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional12. pengoordinasian bahan intervensi daerah rawan pangan13. pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan14. pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan15. pengelolaan cadangan pangan pokok dan pangan pokok lokal;



Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. pengawasan keamanan pangan segar;2. pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi3. penghitungan Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi dan peta pola konsumsi pangan4. persiapan promosi Keanekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal, konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal5. penetapan hasil analisis dan kajian dalam rangka promosi Keanekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;6. bimbingan teknis/sosialisasi gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu7. pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;8. pengembangan/kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan Keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal9. sertifikasi jaminan keamanan pangan segar10. pengoordinasian Jejaring Keamanan Pangan Daerah11. pengoordinasian komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan
Bidang Pertanian dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none">1. pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian2. pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kota3. penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah4. pengoordinasian pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan5. pengoordinasian penyediaan, pengawasan, pengendalian mutu dan peredaran benih/bibit ternak, tanaman pakan ternak serta pakan6. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer7. pemberdayaan sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak8. penerbitan rekomendasi Surat Izin Praktek dokter hewan;9. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular10. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah11. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;12. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan13. penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, klinik hewan, pasar



	<p>hewan, Rumah Potong Hewan, Produk Hewan serta pengecer meliputi toko, retail, sub distributor obat hewan</p> <ol style="list-style-type: none">14. persiapan promosi produk pertanian dan peternakan pasca panen;15. pemberdayaan dan pengelolaan usaha kecil pertanian dan peternakan pasca panen berbasis ekonomi kreatif
Bidang Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan;2. penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan di bidang pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;3. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan4. pemberdayaan usaha kecil pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan berbasis ekonomi kreatif5. pengelolaan pembudidayaan ikan6. pengelolaan kegiatan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;7. pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan serta obat ikan;8. pengoordinasian pengelolaan kawasan budidaya perikanan dan perairan umum berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;9. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;

